

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yang tergolong dalam salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata. Berbagai masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata salah satunya masalah di bidang kependudukan kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan serta pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk membuat pemetaan yang tepat, guna menanggulangi masalah kependudukan tersebut.

Era globalisasi saat ini sangat erat kaitannya dengan peran bidang komunikasi dan informatika dalam Bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), TIK sudah menjadi tuntutan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari masyarakat, swasta hingga pemerintahan. Dengan adanya kehadiran TIK ini membuat pemerintah melakukan suatu langkah agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, sehingga penyampaian informasi dari pemerintah kepada pemerintah atau pemerintah kepada masyarakat sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika):

“Merupakan langkah pemerintah Indonesia menuju *Good Governance* yang kemudian didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* atau *E-Government*”.

E-Government merupakan kependekan dari *Electronic Government* atau di adaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Pemerintahan Elektronik. *E-Government* biasa dikenal *E-Gov*, pemerintah digital, merupakan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat empat fungsi pemerintahan salah satunya yaitu fungsi pelayanan. Peran pelayanan sebagai salah satu fungsi pemerintahan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Dalam hal ini pelayanan yang dimaksud dapat berupa pelayanan publik.

Saat ini dengan munculnya internet, teknologi berbasis web, dan ekonomi jaringan global adalah kemajuan TIK yang paling terlihat. Internet adalah saluran layanan yang dapat membantu warga dan pemerintah membangun kepercayaan. Banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memberikan layanan publik.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah provinsi jawa barat, telah membuat dan mengembangkan *website* <https://siap.jabarprov.go.id> terhitung mulai dari akhir tahun 2021. Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat mempunyai tujuan untuk terwujudnya suatu sistem informasi manajemen pengelolaan kepegawaian yang terintegrasi dalam suatu jaringan komputer, yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia di bidang pemerintahan. Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR) sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk semua aparatur dilingkungan pemerintah provinsi jawa barat, karena pegawai merupakan aset penting dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pegawai yang baik dimulai dalam lingkup kecil, dengan lingkup kecil akan meningkatkan kinerja pegawai, sedangkan untuk lingkup yang lebih besar akan membawa perbaikan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Melihat pentingnya pengelolaan data pegawai, untuk itu diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan data kepegawaian melalui penerapan Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR).

Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 26 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pasal 1 ayat (18) :

"Sistem Informasi ASN Jawa Barat adalah sistem informasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Badan

dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi ASN secara nasional yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara”.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 127 ayat (1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat yang kemudian disebut dengan (SIAP JABAR) merupakan sebuah sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengolah data, manajemen dan administrasi kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jumlah OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat sebanyak Sebanyak 46, dimana masing-masing OPD memiliki fasilitator untuk memverifikasi data pegawai terkait dengan Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR).

Pengelolaan data pegawai merupakan hal yang tidak bisa dihindari pada institusi pemerintah sebagai sarana untuk menyimpan sebuah informasi dan data - data menjadi terstruktur serta sistematis. Bidang kepegawaian adalah salah satu bidang yang mengurus berbagai hal mengenai data pegawai yang mencakup perencanaan, pengolahan, pengadaan, pensiun, mutasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan data serta informasi pegawai.

SIAP JABAR merupakan aplikasi yang memuat seluruh data kepegawaian ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui *One Big Data* ini, seluruh pelayanan kepegawaian baik itu kenaikan gaji berkala, naik golongan, pensiun, penghargaan, pendidikan lanjutan, dan layanan kepegawaian lainnya tidak memerlukan lagi berkas fisik. Selain itu, melalui digitalisasi ini juga memberikan notifikasi untuk pegawai yang sudah waktunya untuk kenaikan gaji berkala.

Dengan kecanggihan ini, tidak ada lagi pegawai yang kenaikan gaji berkalanya terlewat atau dokumennya terselip. Hal ini tentu memudahkan pegawai di lingkungan Pemprov Jabar baik fasilitator kepegawaian maupun pegawai sebagai penerima pelayanan.

SIAP JABAR lahir dengan tujuan mendukung ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap sebagai bahan kebijakan dan perkembangan karir ASN. Dalam perkembangannya BKD melakukan terobosan dalam pengelolaan data dan pelayanan administrasi kepegawaian dengan meluncurkan SIAP JABAR dengan 7 aplikasi layanan kepegawaian yang dapat dimanfaatkan seluruh ASN, yang terdiri dari e-Cuti, e-fungsional, e-Kartu, e-KGB, e-Mutasi, e-Pangkat, dan e-Pensiun serta Verifikasi Pemutakhiran Data Mandiri. Dari ketujuh sistem layanan Kepegawaian peneliti memilih untuk melakukan penelitian layanan kepegawaian *electronic*-Kenaikan Gaji Berkala (*e*-KGB). Penelitian ini sangat lah penting dilakukan karena Layanan kepegawaian sangat penting menyangkut keberlangsungan karir Aparatur untuk mendapatkan data PNS yang akurat, efektivitas dan efisiensi yang terintegrasi antar instansi BKN dan secara nasional, transparan dan obyektif.

Berikut ini merupakan tampilan *Dashboard* dari Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR).

Gambar 1.1
Dashboard SIAP JABAR

Jenis Dokumen	Keterangan	Status	File	Aksi
SK CPNS	-	✓ SK CPNS		Upload
SK PNS	-	✓ SK PNS		Upload
KARIRG	-	✓ KARIRG		Upload
KARIRKARSI	-	✓ KARIR		Upload
SKP	-	✗		Upload
SK_RANGKAP	-	✓ SK_RANGKAP		Upload
KGB	-	✓ 188000 SK Gaj Berkala		Upload


Jenis Dokumen	Status	File	Aksi
UNIP	✓	Download	Upload
KARIRG	✓	Download	Upload
SK CPNS	✓	Download	Upload
SK PNS	✓	Download	Upload
Rekening Bank (RBB)	✓	Download	Upload
KARIR	✓	Download	Upload
Diklat Struktural			Upload
Belum ada email			Upload
Sertifikat PIR			Upload
Belum ada email			Upload
SKP 2 Tahun Terakhir			Upload
SKP 2020	✗	Belum ada file	Upload
SKP 2021	✗	Belum ada file	Upload
KGB Teraktif	✓	Download	Upload
12/18/STG 14/Sevra			Upload
2018/18/Sevra 10/Sevra			Upload

(Sumber Gambar: <https://siap.jabarprov.go.id> peneliti, 2023)

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa Dimana untuk mengakses *electronic-Kenaikan Gaji Berkala*, pegawai *login* terlebih dahulu ke *website* <https://siap.jabarprov.go.id>. Kemudian klik Layanan Kepeg lalu klik *e-KGB* untuk pengajuan Kenaikan Gaji Berkala. Kenaikan gaji berkala (KGB) adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yakni setiap dua tahun sekali dan besaran Kenaikan Gaji Berkala setiap Golongan berbeda-beda, apabila telah memenuhi persyaratan.

Gambar 1.2
Daftar Gaji Pokok ASN


LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETUHLUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL



REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN
DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL


MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV			
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d
0	1.486.500																		
1	1.533.400																		
2	1.623.400	1.692.100	1.763.600																
3	1.681.700	1.745.400	1.819.200																
4	1.735.900	1.800.300	1.876.500	1.926.000															
5	1.790.500	1.857.800	1.935.600	2.017.900	2.102.300														
6	1.846.900	1.915.500	1.996.500	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000												
7	1.905.100	1.985.000	2.068.100	2.157.800	2.251.200	2.348.500	2.431.200	2.518.200											
8	1.965.100	2.050.000	2.142.300	2.240.400	2.342.300	2.448.000	2.553.500	2.658.000	2.762.500										
9	2.027.000	2.123.600	2.227.200	2.337.000	2.450.000	2.567.000	2.683.000	2.803.000	2.922.000	3.045.000									
10	2.090.800	2.198.600	2.313.400	2.434.400	2.559.000	2.688.000	2.820.000	2.955.000	3.090.000	3.228.000									
11	2.156.700	2.275.600	2.402.600	2.534.800	2.672.000	2.814.000	2.959.000	3.107.000	3.258.000	3.412.000									
12	2.224.600	2.355.200	2.494.800	2.642.600	2.796.000	2.955.000	3.117.000	3.282.000	3.445.000	3.612.000									
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			
57																			
58																			
59																			
60																			
61																			
62																			
63																			
64																			
65																			
66																			
67																			
68																			
69																			
70																			
71																			
72																			
73																			
74																			
75																			
76																			
77																			
78																			
79																			
80																			
81																			
82																			
83																			
84																			
85																			
86																			
87																			
88																			
89																			
90																			
91																			
92																			
93																			
94																			
95																			
96																			
97																			
98																			
99																			
100																			

REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN
DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL



REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN

Rakhan sesuai dengan salibnya
KEMENTERIAN BERHUBUNGAN DENGAN
PARLISMAN DAN PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERUMAHAN



Muhammad Ragan Murti

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

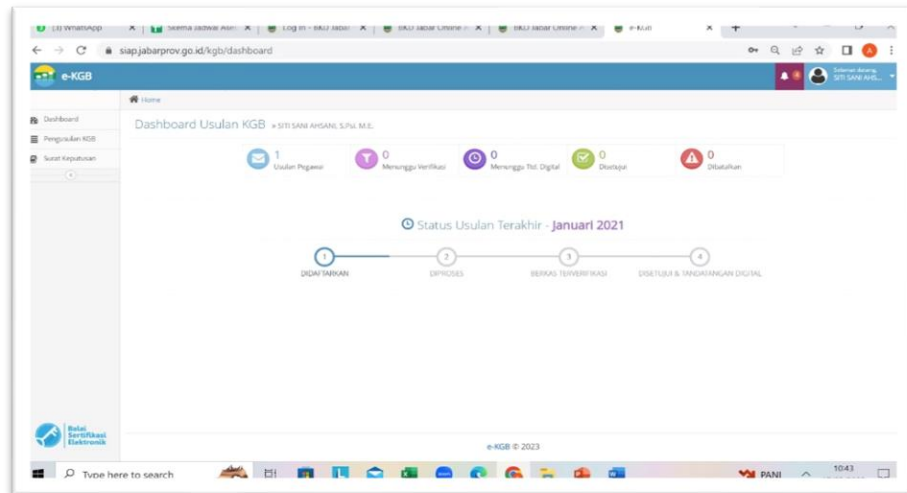
JOKO WIDODO

(sumber gambar : Hasil screenshot peneliti, 2023)

Gambar 1.2 merupakan daftar gaji pokok ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Pemerintah, 2019) tentang Perubahan kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Sebagai acuan dalam memberikan gaji pokok bagi Aparatur Sipil Negara

Persyaratan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai pemohon menyiapkan SK-CPNS, SK-PNS, KARPEG, KARIS/KARSU, SKP, SK-Pangkat, KGB kemudian untuk Prosedur Kenaikan Gaji Berkala menggunakan Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR) seperti berikut : Pertama pemohon dapat mengakses e-KGB melalui aplikasi SIAP JABAR menggunakan *web browser* <https://siap.jabarprov.go.id>. Kedua masukan *Username* dan *Password* lalu klik login selanjutnya klik layanan Kepeg lalu klik *e-KGB*, setelah itu pegawai Mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala dan mengecek kelengkapan berkas. ketiga Proses Verifikasi akan dilakukan oleh Pengelola Perangkat Daerah masing-masing yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keempat Berkas terverifikasi kemudian disetujui dan ditanda tangan digital. Berikut Gambar Proses dari *electronic-Kenaikan Gaji Berkala*.

Gambar 1.3
Alur Proses *electronic*-Kenaikan Gaji Berkala



(Sumber Gambar: <https://siap.jabarprov.go.id> peneliti, 2023)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa alur proses *electronic*-kenaikan gaji berkala dimulai dari proses usulan pegawai untuk mengisi persyaratan melalui aplikasi SIAP JABAR, kemudian menunggu verifikasi dari pihak fasilitator, apabila telah data telah di verifikasi maka selanjutnya menunggu ttd digital, apabila SK-KGB telah di ttd digital maka proses kenaikan gaji berkala telah disetujui maka aparatur telah menerima SK-KGB terbaru.

Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah yaitu : pertama kurangnya komunikasi antara fasilitator kepada aparatur penerima KGB belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan aparatur kurang mengetahui sebuah kebijakan penggunaan SIAP JABAR khususnya e-KGB. Dikarenakan penyampaian informasi yang dilakukan hanya sekali. Terdapat kendala dari jaringan internet, update nya Sistem yang mengakibatkan halaman Usulan

Kenaikan Gaji Berkala mengalami eror. Tidak adanya respon dari teknisi SIAP JABAR apabila terjadi masalah pada SIAP JABAR khususnya e-KGB.

Berdasarkan beberapa masalah diatas maka diperlukan sebuah metode sistem dalam proses pengambilan keputusan kenaikan gaji berkala dengan mudah. Salah satu solusi ialah melihat efektif atau tidaknya sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (SIAP JABAR).

Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi melalui sistem informasi Aparatur provinsi jawa barat diharapkan dapat mempermudah Aparatur dalam melakukan layanan Informasi Kepegawaian kapanpun dan dimanapun tanpa harus melewati proses birokrasi yang berbelit-belit, dengan begitu maka layanan publik dapat ditingkatkan.

Untuk mengukur Implementasi Kebijakan E-Government Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus *electronic*-Kenaikan Gaji Berkala) diukur melalui empat kriteria yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) yaitu: *communication*, *resources*, disposisi, dan *bureaucratic structure*.

Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti merujuk beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema tentang kebijakan *E-Government*, yang menjadi bahan referensi bagi peneliti saat ini. Pertama, Dewi Kurniasih, Tatik Fidowaty, dan Poni Sukaesih pada tahun 2013 mengenai pengaruh implementasi kebijakan E-Government terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan E-Government memberikan pengaruh sebesar 54,85% terhadap perubahan kinerja aparatur pemerintah di Kota

Cimahi. Walaupun pengaruhnya mungkin tidak terlalu besar, implementasi kebijakan E-Government tetap dianggap sebagai faktor yang dominan dalam menentukan perubahan kinerja aparatur pemerintah di wilayah tersebut.

Kedua, Karniawati Nia (2011) dengan judul Analisis Kebijakan Penerapan *E-Government* Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) dari dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Komputer Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah kondisi data infrastruktur belum bisa dijalankan secara optimal karena keterbatasan fasilitas, untuk ketersediaan sumber daya aparatur dalam pengelolaan SIMPEG sudah cukup memadai apabila hanya untuk dijadikan sebagai user.

Ketiga, Maulana Ariyanto (2015) Analisis pelaksanaan *E-Government* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang (studi pada pelayanan, e-registration, e-SPT, dan e-filling). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa penerapan e-government sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai, pengaruh penerapan e-government yang sangat kuat harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang sudah baik serta memadai agar kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah menjadi sangat baik. Sehingga bisa tercipta suatu lingkungan dan budaya kerja organisasi yang menginginkan segala suatu hal dilakukan dengan cepat dan praktis.

Keempat, Riva Nur Inayah (2010) Implementasi *E-Government* di Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelatihan terhadap pegawai, updating data dan informasi yang didapat pada website serta penggunaan anggaran merupakan factor yang dapat mendukung

pengembangan *e-government* di Pemerintah daerah. Dengan adanya pelatihan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang ada.

Kelima, Rino Adibowo, Sylvia Octa Putri (2016) Penerapan *E-Government* Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa aplikasi tersebut belum memiliki page khusus dalam portal, Belum tersedianya pilihan multi bahasa, belum terlihat hasil dan manfaat dari kerjasama *sister city* antara Pemerintah Kota Bandung dengan kota lainnya yang dapat diakses oleh publik didalam portal bandung.go.id.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan di atas, bahwa Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan harus berkualitas yang sudah dilatih melalui tahap latihan, serta pengelolaan teknologi khususnya dibidang sistem informasi sangat beriringan dengan konsep *e-governance*. Perkembangan teknologi yang cepat dan informasi semakin mudah di akses oleh masyarakat luas menuntut instansi pemerintahan melakukan perubahan layanan. Penggunaan sistem informasi aparatur provinsi jawa barat (SIAP JABAR) pada badan kepegawaian daerah provinsi jawa barat dilakukan agar menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Dalam pemaparan hasil penelitian diatas diketahui terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan.

Kelima penelitian di atas, memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai *E-government*. Kesamaan aspek antara kelima penelitian tersebut dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama berfokus pada aspek implementasi kebijakan *e-Government*. Penelitian yang keempat juga sama-sama membahas mengenai aspek analisis *E-government* suatu wilayah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan *E-Government* Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR) khususnya e-KGB pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan *E-Government* (*E-Government*) (Studi Kasus Pada Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR) khususnya *Electronic*-Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi?.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan *E-Government* (*E-Government*) (Studi Kasus Pada Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR) khususnya *Electronic*-Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komunikasi dari Implementasi Kebijakan *E-Government* khususnya *Electronic*-Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Untuk mengetahui sumber daya pada Implementasi Kebijakan *E-Government* khususnya *Electronic*-Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Untuk mengetahui disposisi pada Implementasi Kebijakan *E-Government* khususnya *Electronic*-Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi pada Implementasi Kebijakan *E-Government* khususnya *Electronic*-Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori implementasi kebijakan *e-Government* dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

a) Guna Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang telah dilakukan semoga memberikan manfaat untuk menambahkan pengetahuan, ilmu, serta pemahaman serta, semangat belajar dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan

dengan Implementasi Kebijakan *E-Government (E-Government)* (Studi Kasus Pada Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR) khususnya *Electronic-Kenaikan Gaji Berkala* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

b) Guna Bagi Lembaga

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek penelitian sehingga diharapkan dengan dilakukanya penelitian ini bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan permasalahan serta dapat menjadi sumber jurnal untuk dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

c) Guna Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk menambah wawasan, ilmu, serta pemahaman.